

## DAMPAK PERSONALISASI PARTAI TERHADAP DEMOKRASI INTERNAL PARTAI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Esty Ekawati, dan Mouliza K Donna Sweinstani

Pusat Penelitian Politik LIPI, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan

Email: [esty1wati@gmail.com](mailto:esty1wati@gmail.com) ; [moulizadonna@gmail.com](mailto:moulizadonna@gmail.com)

**ABSTRAK.** Partai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Namun, disaat partai politik dewasa ini dituntut untuk menjadi partai modern yang menjalankan aktivitasnya secara legal dan rasional, di era reformasi partai justru terjerumus dalam berbagai persoalan, salah satunya adalah masalah personalisasi partai politik. metode kualitatif eksplanatori dengan menjelaskan fenomena personalisasi politik dalam PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem, diketahui bahwa faktor penyebab partai masih didominasi oleh satu figur/individu tertentu adalah kharisma figur, kultur patron-klien, dan motif ekonomi. Sekalipun beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa personalisasi partai politik dalam kondisi tertentu menguntungkan partai untuk menjaga soliditas partai, studi menemukan bahwa dampak positif tersebut hanyalah dampak yang bersifat semu dan jangka pendek. Personalisasi partai politik tidak dapat dimaklumi dan dikompromikan karena fenomena tersebut berdampak pada bangunan partai politik yang dibangun dari sistem ketergantungan pada figur-figur tertentu yang dapat berperan secara holistik bagi partainya. Lebih lanjut, kondisi ini mengancam demokrasi internal partai yang membuat institusionalisasi partai politik menjadi terhambat, matinya demokrasi internal partai, hingga dampak buruk pada sirkulasi elit.

**Kata kunci:** Demokrasi Internal Partai; Institusionalisasi Partai Politik; Personalisasi Partai Politik

**ABSTRACT.** *Political parties are one of the important instruments in building democracy. However, when political parties are demanded to be modern parties that carry out their activities legally and rationally, in the reform era, parties have fallen into various problems, one of which is the problem of personalizing political parties. By using qualitative explanatory methods that try to the phenomenon of political personalization in the Indonesian Democratic Party of Struggle, the Gerindra Party, and the Nasdem Party, it is known that factors caused the party personification are the charisma of certain person, patron-client culture, and economic motive. Although some previous studies have stated that personalizing political parties under certain conditions favors parties to maintain party solidity, the study found that these positive impacts were only apparent and short-term impacts. Personalization of political parties cannot be tolerated and compromised because the phenomenon has an impact on the building of political parties that are built from a system of dependence on certain figures who can play a holistic role for their parties. Furthermore, this condition threatens the party's internal democracy which makes the institutionalization of political parties hampered, the death of party's internal democracy, to the adverse impact on the elite circulation.*

**Key words:** Intra-Party Democracy; Party Institutionalization; Personalized Party Politics

### PENDAHULUAN

Partai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Schattschneider mengatakan bahwa partai politik menciptakan demokrasi dan demokrasi modern tidak bisa dilepaskan dari partai (W. P. Cross & Katz, 2013). Partai politik berperan sebagai saluran bagi pejabat publik untuk dapat duduk dalam jabatan publik tertentu melalui mekanisme sosial berupa pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat (Lipset, 2000). Linz dan Stepan juga menyatakan bahwa perkembangan partai politik merupakan bagian dari perkembangan “*political society*” untuk mengontrol kekuasaan negara dan aparatus politiknya (Linz & Stepan, 1996). Selain

itu, dalam kaitannya dengan roda pemerintahan, partai politik berperan sebagai penghubung antara kepentingan warga dan pemerintah, mendorong pemerintah menjadi responsif terhadap warga negara, serta memberikan pengaruh pada proses-proses politik di legislatif (Stokes, 1999). Lebih jauh, menurut Scarrow (2005), selain berperan penting dalam mengartikulasikan kepentingan suatu kelompok, kohesivitas partai politik dalam lembaga legislatif juga mampu menciptakan pemerintahan yang efektif.

Sekalipun memiliki peranan yang strategis dengan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah (Dalton, 1985; Dalton, Farrell, & McAllister, 2015; S. Scarrow, 2005), tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik

hampir diseluruh negara demokrasi memiliki permasalahan yang harus dibenahi. *Dalton, Farrell, dan McAllister (2015)* bahkan secara tegas menyatakan bahwa partai politik telah gagal melaksanakan fungsi-fungsi demokratisnya. Salah satu permasalahan partai politik yang menarik untuk dikaji dan kini mulai menjamur terjadi dalam tubuh partai politik di Indonesia adalah masalah kepemimpinan partai yang mengarah pada personalisasi (dalam partai) politik. Personalisasi partai politik dapat diartikan sebagai kondisi dimana individu elit memiliki posisi lebih penting dibandingkan organisasi partainya atau identitas kolektif lainnya (*Karvonen, 2010; Mancini & Swanson, 1996; Rahat & Sheaffer, 2007*). Fenomena ini mulai santer menggejala di Indonesia khususnya pada era demokratisasi pasca-Orde Baru. Sebut saja Megawati Soekarno Putri yang menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dari tahun 1999-sekarang dan menjadi tokoh sentral dalam partai. Kemudian ada Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan penggagas dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga menjadi tokoh sentral dalam partai tersebut. Amien Rais, sebagai pendiri PAN merupakan tokoh yang juga memiliki pengaruh besar dalam partai tersebut sejak kelahirannya tahun 1998. Tokoh lainnya yakni Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi sosok kharismatik yang mendirikan PKB dan menjadi Ketua Dewan Syuro selama kurang lebih sembilan tahun hingga pada akhirnya PKB pecah dan kepemimpinan berganti kepada Muhaimin Iskandar yang juga memiliki pengaruh cukup kuat di PKB pasca-Gusdur hingga kini. Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra juga merupakan tokoh sentral partai tersebut. Terakhir adalah Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem yang belum tergantikan hingga sekarang. Keenam contoh elit partai tersebut menjadi aktor utama dalam pengelolaan partai yang juga berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan partai politik secara holistik. Selain bertahan sebagai pemimpin utama partai, figur-figur tersebut juga menjadi identitas/*image* yang melekat dengan partai yang dipimpinnya.

Adanya fenomena personalisasi partai politik yang mulai menggejala di era reformasi Indonesia menjadi sebuah anomali karena hal ini sesungguhnya berseberangan dengan

upaya negara me-reinstitusionalisasi partai politik melalui Undang-Undang Partai Politik. Sesungguhnya, partai memiliki mekanisme internal dan struktur partai yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing dalam pengorganisasian partai. Namun, seiring dengan munculnya figur kuat yang memiliki peran holistik tersebut, partai politik yang seharusnya terorganisir secara modern justru berjalan mundur menjadi partai yang dikelola secara tradisional yang bercirikan kepemimpinan kharismatik dan patrimonial (*Calise, 2015; Nurhasim, 2013*). Salah satu contoh dari kemunduran pengelolaan partai tersebut dapat dilihat dari penentuan bentuk dan pengisian gerbong kepengurusan partai yang sering kali bersifat kolusif dan nepotis. Pada dasarnya, setiap partai politik memiliki mekanisme tersendiri dalam pemilihan pemimpin yakni bisa melalui musyawarah, aklamasi maupun *votting*, dan semua mekanisme ini tertuang dalam AD ART partai. Namun, kecenderungan yang terjadi dalam suksesi kepemimpinan partai adalah aklamasi dengan calon tunggal, seolah tidak membuka peluang bagi kader partai lain untuk mengikuti suksesi. Begitu pula ketika pengisian struktur pengurus partai. Tidak jarang posisi-posisi strategis partai politik diisi oleh orang-orang terdekat ketua partai, tanpa melalui sebuah mekanisme yang demokratis.

Studi-studi terdahulu tentang personalisasi politik menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab dan dampak dari personalisasi partai politik. Sartori dalam Mair (2002) menjelaskan bahwa personalisasi politik dalam tubuh partai bukan sebuah kecelakan melainkan terjadi karena partai memiliki keterbatasan kemampuan dalam menentukan pilihan dan perubahan terhadap lembaganya. Keterbatasan pengelolaan partai tersebut sering kali dipicu karena tingginya loyalitas konstituen yang terlampaui pada pimpinan partai, meningkatnya peran dan pengaruh pemimpin (Pilet & Cross, 2015), kharisma seorang tokoh yang sangat kuat (Rhodes & Hart, 2014), dan kultur patronase yang tumbuh dalam partai (Blondel & Thiebaut, 2010). Selain berasal dari faktor internal partai itu sendiri, personalisasi politik dalam partai juga dapat terjadi karena beberapa faktor eksternal, seperti sistem politik dan sistem pemilu, khususnya sistem presidensialisme yang dikombinasikan dengan mekanisme pemilihan

langsung (Alhamid & Perdana, 2018; Noor, 2009; D. J. Samuels, 2002; D. Samuels & Shugart, 2010) dan sistem kepartaian multi partai (Sartori & European Consortium for Political Research., 2005; Yudha, 2010). Sementara berkaitan dengan dampak dari personalisasi partai politik, hal ini dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya faksi dalam partai politik di Indonesia yang belakangan terjadi (Budiatri, 2018; Nurhasim, 2013). Namun, dalam perspektif lain, Budiatri (2018) dan Rahat & Kenig (2018) juga menyetengahkan bahwa hubungan personalisasi politik dalam partai politik tidak selama berdampak buruk. Ada kalanya personalisasi politik ini justru membuat partai politik dapat bertahan karena suntikan semangat dari tokoh yang diangungkan tersebut. Oleh karena itu, sekalipun di satu sisi personalisasi politik dalam partai dapat merugikan institusionalisasi partai itu sendiri, pada beberapa kasus personalisasi politik dalam tubuh partai justru dapat menguntungkan partai

Berangkat dari beberapa studi sebelumnya yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, studi ini akan menganalisis bagaimana bentuk personalisasi partai politik yang terjadi di Indonesia dan bagaimana dampak dari personalisasi tersebut bagi partai politik itu sendiri. Jika berpijak pada studi sebelumnya, sekalipun fakta menunjukkan bahwa personalisasi politik dapat berdampak positif khususnya untuk soliditas partai di suatu keadaan tertentu, dalam artikel ini penulis mengambil posisi bahwa dampak positif tersebut hanya dapat dikompromikan pada awal pendirian partai saja. Sementara itu, ketika aktivitas partai sudah berjalan lama dan mapan, rotasi kepemimpinan dan optimalisasi struktur partai harus ditegakkan guna mencapai partai yang terinstitusionalisasi dengan baik. Oleh karena itu, studi ini juga hendak membuktikan apakah benar bahwa dampak positif dan negatif dari personalisasi partai politik seperti yang dikemukakan oleh studi sebelumnya dapat dikompromikan dan dimaklumi dalam konteks studi partai-partai di Indonesia, khususnya dalam PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Ketiga partai ini dipilih karena ketiganya merupakan contoh partai yang memiliki satu figur kuat yang menjadi image partai dan mampu mengatur seluruh aktivitas partainya. Selain itu, ketiga partai ini juga merupakan partai yang memiliki

perolehan suara yang cukup konsisten yang dilihat dari hasil Pemilu 2014 dan Hasil Pemilu 2019.

### ***Personalisasi partai politik: Sebuah Konsep***

Sebagai salah satu instrumen penting demokrasi, keberadaan partai politik merupakan sebuah keniscayaan. *Giovanni Sartori* mendefinisikan partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik (*Sartori*, 2005). Meski demikian, partai-partai politik di Indonesia era demokratisasi justru banyak yang terjebak dalam fenomena personalisasi.

Personalisasi partai politik merupakan kondisi di mana aktor individu menjadi lebih utama dibandingkan partai politik maupun identitas kolektifnya (*Karvonen*, 2010). Bahkan aktor tersebut kerap menjadi *image* maupun identitas dari partai tersebut. Dalam konteks umum, yang kerap digunakan untuk membahas mengenai personalisasi partai, maka dapat merujuk pada *Renwick & Pilet* (2016) bahwa personalisasi mengarah pada pemimpin partai politik sebagai aktor utamanya.

Personalisasi partai politik dapat dilihat setidaknya dari tiga hal utama yang terjadinya personalisasi yakni: 1). Partai politik dan pemerintahan dalam hal ini pengaruh individu elit sangat besar terhadap partai politik maupun pemerintahan. 2). Pemilu, di mana dalam konteks tersebut, individu memiliki pengaruh yang sangat besar terkait dengan proses kandidasi dan nominasi dalam pemilu. 3). Media, yang dalam lingkup ini, pemberitaan dari media lebih fokus terhadap individu dibandingkan partai itu sendiri (Budiatri, 2018; *Renwick & Pilet*, 2016).

Adapun, personalisasi partai setidaknya memiliki beberapa karakter. *Pertama*, partai kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan sehingga suksesi kepemimpinan cenderung dilakukan secara personal. Dalam beberapa kasus, partai politik bahkan kesulitan mencari sosok pemimpin partai dan calon presiden. *Kedua*, pergantian kepemimpinan di tubuh partai politik menciptakan lahirnya faksi-faksi politik. Faksi politik ini akhirnya mendorong sebagian kadernya keluar dari partai dan mendirikan partai baru. *Ketiga*, kuatnya pengaruh budaya dan perilaku

masyarakat yang terbelah di antaranya dicirikan oleh kuatnya referensi politik atas dasar etnik, agama, kelas, dan kota/desa. Sebagai sebuah organisasi, partai politik tidak berada dalam ruang yang kosong. Masyarakat dan *civil society*, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, menjadi salah satu sumber kader dan kepemimpinan partai. Oleh karena itu, faktor-faktor budaya patrimonial, patron-klien, dan patriarki yang masih lekat pada sebagian masyarakat Indonesia menjadi pengaruh tersendiri bagi menguatnya partai sebagai organisasi yang makin tertutup dan oligark. *Keempat*, masuknya keluarga atau kekerabatan ke dalam struktur partai politik dan menguasai politik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal (Nurhasim, 2013).

Berdasarkan definisi dan karakter tersebut maka teori personalisasi partai dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan yang terjadi di beberapa partai politik di Indonesia pasca Orde Baru.

## METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif-eksplanatori dengan menjelaskan fenomena personalisasi politik dalam PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem serta dampak dari personalisasi tersebut di kedua partai itu. Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari kajian pustaka yang relevan serta dokumen partai politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk dan Penyebab Personalisasi Partai Politik di Indonesia

Dalam perpolitikan di Indonesia terutama pasca Orde Baru di mana demokratisasi partai politik kerap digaungkan justru muncul fenomena yang berpotensi melemahkan upaya demokrasi internal partai. Kondisi tersebut dapat dilihat dari munculnya dominasi individu-individu tertentu dalam partai politik. Bahkan ketika kita menyebut partai tertentu maka justru sosok individu tertentu yang melekat. Seperti jamak diketahui bahwa Partai Demokrat identik dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDI Perjuangan akan identik dengan sosok Megawati Soekarnoputri dan ketika

menyebut partai Gerindra maka figur Prabowo Subianto sangat kuat mewarnai setiap langkah politik partai tersebut, serta tak kalah ketika figur Surya Paloh menjadi sangat mendominasi Partai Nasdem.

Figur-figur sentral tersebut menjadi identitas atau *image* partai tentu tidak dapat dilepaskan dari peran politiknya, baik sebagai tokoh yang mendirikan partai, maupun kiprahnya selama menjadi pemimpin partai. Di satu sisi, peran figur menjadi prasyarat penting dalam membangun pelembagaan partai, karena dengan memiliki figur yang demokratis maka pelembagaan partai dapat terjadi. Namun di lain sisi, peran figur yang terlalu dominan dalam segala kebijakan justru berbahaya bagi demokrasi internal partai dan tentunya berpotensi melemahkan partai itu sendiri.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji dalam sistem demokratisasi di internal partai adalah terpilihnya beberapa ketua umum secara aklamasi. Bahkan, ketua umum tersebut merupakan calon tunggal sehingga dapat terpilih kembali hingga beberapa periode sirkulasi kepemimpinan. Meskipun di beberapa partai politik mekanisme aklamasi merupakan mekanisme yang sah dan diatur dalam AD ART, namun mekanisme aklamasi yang dibarengi dengan calon tunggal justru berbahaya bagi demokrasi internal partai. Hal ini dikarenakan calon tunggal dapat menghilangkan kompetisi demokratis dalam sirkulasi kepemimpinan. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan gejala personalisasi.

**Tabel 1. Aturan partai tentang pemilihan ketua umum**

Partai	Bentuk Kegiatan	Periode Suksesi	Mekanisme Suksesi
PDI Perjuangan	Kongres	5 tahun	Mufakat, Aklamasi, Voting
Partai Gerindra	Kongres	5 tahun	Mufakat dan Voting
Partai Nasdem	Ratas dalam Kongres	5 tahun	Keputusan Majelis Nasional

Sumber: diolah dari AD ART Partai

Beberapa partai politik di Indonesia yang mengalami personalisasi dalam pembahasan makalah ini antara lain; PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Adapun gejala

personalisasi partai dalam konteks ini dilihat dalam proses suksesi kepemimpinan yang terjadi dan pola ketergantungan partai terhadap figur utama yang dalam hal ini adalah ketua umum.

## 1. PDI Perjuangan

Sebelum menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDI Perjuangan), partai ini bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dideklarasikan pada 10 Januari 1973 yang terdiri dari lima fusi partai yakni Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba dan Partai Nasional Indonesia. Kejayaan PDI diawali dengan tampilnya Megawati Soekarno Putri pada Pemilu 1987 yang pada akhirnya pada pemilu 1987 dan 1992 PDI mendapatkan peningkatan suara dan kursi di DPR RI. Meski terjadi konflik dan dualisme kepemimpinan dalam PDI yakni antara Megawati dan Soerjadi, namun pada akhirnya kubu Megawati yang mendapatkan dukungan besar dari masyarakat. Pada tanggal 1 Februari 1999, PDI kelompok Megawati membentuk partai baru yang masih memiliki pertalian sejarah dengan PDI yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Nama partai dari PDI diubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Azas partai adalah Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Selain nama, PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala Banteng dalam segi lima menjadi Banteng gemuk dalam lingkaran (Litbang Kompas, 1999). Dalam perjalannya, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati mampu memperoleh suara terbanyak pada pemilu 1999.

Membicarakan PDI Perjuangan tidak dapat dilepaskan dari sosok Megawati, karena Megawati pada akhirnya menjadi figur yang sangat berpengaruh dalam partai tersebut. Bahkan, posisi Ketua Umum PDI perjuangan masih dipegang oleh Megawati hingga sekarang. Pada pertengahan tahun 2019, PDI Perjuangan kembali melakukan Kongres ke V. Untuk kesekian kalinya, alih-alih terdapat kompetisi antar-kader untuk memperebutkan posisi ketua umum, justru PDI Perjuangan kembali menentukan Megawati sebagai ketua umum melalui proses aklamasi (Redaksi CNN Indonesia, 2019a). Meskipun aklamasi merupakan mekanisme yang sah karena tertuang

dalam AD ART PDI Perjuangan namun, proses penentuan ketua umum yang merupakan calon tunggal secara aklamasi berdampak negatif terhadap demokrasi internal partai. Kondisi yang terjadi di PDI Perjuangan menggambarkan apa yang disebut oleh Karvonen sebagai personalisasi partai di mana aktor individu menjadi lebih utama dibanding partai itu sendiri. Bahkan, figur Megawati pada akhirnya menjadi identitas partai. Eros Djarot menilai peran dan figur Megawati sebenarnya melampaui partai yang dikelolanya. *“Megawati itu PDIP, PDIP itu Megawati. Mega tanpa PDIP tetap Mega, tapi PDIP tanpa Mega bukan PDIP sebagaimana yang kita pahami sekarang (Utama, 2019).”*

Mengapa figur Megawati menjadi begitu kuat melekat pada PDI Perjuangan sehingga ia menjadi satu-satunya calon dalam setiap momen sirkulasi kepemimpinan? Menurut Andreas Hugo Pereira, hal ini dikarenakan peran Megawati belum dapat dialihkan kepada kader lain. Pengalaman Megawati memimpin PDI melewati rezim Orde Baru dan membawa PDI Perjuangan memenangkan pemilu terakhir sulit dibantah. Atas dasar itulah, sebanyak 514 kepengurusan PDI Perjuangan dari tingkat paling rendah hingga provinsi kembali mendukung Megawati pada Kongres V tahun 2019 untuk menjadi Ketua Umum. Seperti yang diungkapkan oleh Pareira (yang dikutip dari media) bahwa;

*“Tidak ada ketua partai yang dapat menandinginya: dua kali menang pilpres dan pileg. Partai lain masih sibuk soal siapa ketua umum, tapi capaian suara kurang. PDIP tidak ada persoalan sama sekali.”*  
*“Dilihat dari banyak aspek, Mega masih sangat layak. Kader partai meminta Mega dikukuhkan lagi secara aklamasi. Suaranya bulat.” (Utama, 2019)*

Peran sentral yang melekat pada figur Megawati menjadikannya sebagai individu yang paling berpengaruh di partai. Ini dapat dilihat ketika proses kandidasi caleg maupun calon kepala daerah. Meski mekanisme kandidasi caleg bersifat terbuka namun dalam proses penetapan tetap bersifat elitis yakni ditentukan oleh elit di DPP dan tentu saja atas persetujuan Ketua Umum. Begitu juga dalam Pilkada, intervensi pusat menjadi penentu pencalonan. Menurut Mada Sukmajati;

“Selama ini kandidat calon kepala daerah yang akan diusung partai politik (*parpol*) lebih banyak ditentukan oleh pusat. Meski pengurus *parpol* di tingkat daerah memiliki andil, namun porsinya sangat kecil. Ini terjadi terutama untuk kandidasi calon gubernur. Bahkan tidak jarang calon yang sudah ditentukan di daerah kemudian dianulir oleh pusat.” (Aini, 2017)

## 2. Partai Gerindra

Pembentukan Partai Gerindra menjelang pemilu 2009 terbilang mendesak. Hal ini dikarenakan partai tersebut ketika dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Rencana pembentukan partai tak lepas dari pembicaraan beberapa tokoh antara lain; Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufni Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Prof Suhardi. Dalam pertemuan tersebut pada 2007, mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk (Gerindra, n.d.). Ketika pembahasan ADR ART, sosok Prabowo Subianto belum turut menjadi bagian dari kelompok ini. Saat itu Prabowo masih menjadi anggota Dewan Penasehat Partai Golkar dan ingin mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar, meski pada akhirnya Jusuf Kalla yang kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Sempat mengalami kemandegan, pembentukan partai pada akhirnya terus dilakukan, hingga Prabowo Subianto mundur dari Golkar dan bergabung dengan partai baru tersebut sebagai salah satu tokoh pendiri. Nama Gerindra muncul diciptakan oleh Hashim Djojohadikusumo. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Sejak terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra di awal pembentukannya, figur Prabowo menjadi *image* partai tersebut. Strategi pemasaran politik yang dilakukan Partai Gerindra dengan menjadikan figur Prabowo Subianto sebagai *brand* politik utama menunjukkan keberhasilan. Bahkan, menjelang pemilu 2014 ketika melihat hasil *polling* terhadap masyarakat, sebanyak 47,9 persen responden tertarik dengan figur Prabowo, sedangkan hanya 5,7% responden yang tertarik

dengan program Partai Gerindra (Nurdiansyah, 2018).

Di tahun 2020, Partai Gerindra mengadakan sirkulasi kepemimpinan. Di awal tahun Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa, partainya tengah menyiapkan Kongres yang mengagendakan pemilihan ketua umum. Ia menyatakan, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto akan maju kembali sebagai calon ketua umum. Pencalonan kembali Prabowo dikarenakan tidak ada calon lain di Kongres Partai Gerindra. Seperti yang dikutip dari pernyataannya di media “*Enggak. Enggak ada calon lain. Insya Allah hanya Pak Prabowo yang akan maju. Saya kira kalau itu kami (kompak). Tidak ada beda pendapat.*”

Muzani menyakinkan bahwa kader Gerindra masih menginginkan Prabowo untuk menjadi ketua umum. Hal ini dikarenakan, figur Prabowo masih diperlukan untuk menjaga Partai Gerindra (Maharani, 2020). Kondisi tersebut nampaknya terbukti dengan terpilihnya Kembali Prabowo Subianto secara aklamasi sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 8 Agustus 2020 di Hambalang.

Penetapan Prabowo sebagai pimpinan partai dalam kongres luar biasa tersebut menjadi menarik untuk dielaborasi lebih mendalam. Meskipun juru bicara Partai Gerindra, Habiburrokhman, menyatakan bahwa kongres luar biasa dengan salah satu agendanya adalah pengukuhan ketua umum partai digelar karena alasan pandemik Covid-19 (Zhacky, 2020), hal ini justru menimbulkan pertanyaan lain karena sepeninggal Suhardi pada tahun 2014, Prabowo selalu terpilih menjadi ketua umum dalam sebuah kongres luar biasa, bahkan sejak awal pendirian ia menjabat sebagai ketua dewan pembina partai. Namun, momentum dua kali keterpilihannya sebagai ketua umum yang merupakan calon tunggal secara aklamasi dan dalam sebuah kongres luar biasa pada tahun 2015 dan 2020, menunjukkan bahwa partai ini seolah benar-benar tidak bisa lepas dari sosok Prabowo. Apalagi jika mengutip dari pernyataan Ahmad Muzani dalam Kongres, “Apakah saudara setuju Prabowo ditetapkan sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina?” dan semua peserta KLB menjawab “setuju”. (beritasatu.com, 2020), apa yang terjadi di dalam tubuh Partai Gerindra bisa jadi tidak hanya sebatas pada personalisasi

partai politik melainkan sebuah cerminan adanya komando terpusat dalam sebuah partai. Kondisi tersebut nampaknya menguatkan beberapa pernyataan kader Gerindra sendiri yang memang mengakui bahwa Partai Gerindra adalah sebuah partai komando (Ahmad, 2019; Redaksi Jemberita, 2019).

### 3. Partai NasDem

Partai NasDem dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Partai ini didukung Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi masyarakat (ormas) bernama sama yaitu Nasional Demokrat (NasDem). Setelah resmi menjadi partai, NasDem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta pemilu (Ilahi, 2013). Kongres I Partai NasDem yang digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi awal sejarah perjalanan Partai NasDem di mana pada Kongres tersebut berbagai keputusan penting dihasilkan. Salah satu keputusan yang dihasilkan yakni pemilihan dan penetapan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018.

Selanjutnya, dalam momen pemilihan pimpinan partai yang dilakukan pada November 2019 yakni melalui Kongres II, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengumumkan susunan pengurus DPP Partai NasDem yang baru sekaligus mengukuhkan dirinya sendiri sebagai Ketua umum Partai NasDem untuk periode lima tahun ke depan. “Setelah saya umumkan, saya akan melantik diri saya sendiri dan beserta semua pengurus DPPs. Dengan pernyataan yang demikian, narasi yang dikemukakan Surya Paloh di atas selain menguatkan *image* personalisasi partai NasDem melalui dirinya juga mencerminkan adanya benih narsisme politik dan pengunggulan kepemimpinan partai oleh dirinya sendiri.

Sebelumnya, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa Surya Paloh berpeluang kembali terpilih sebagai ketua umum, sebab banyaknya dorongan dari daerah agar Surya Paloh kembali memimpin, dan juga tidak ada calon lain. Menurut Plate, mekanisme pemilihan Ketum Nasdem akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART. Ia juga memastikan meski Surya Paloh diprediksi terpilih lagi secara aklamasi dalam pemilihan ketua umum Partai

Nasdem, namun proses tersebut tetap akan sesuai dengan aturan main (Ferdiansyah, 2019).

*“Mekanisme caketum sesuai AD/ART agak berbeda dengan partai lain. Kalau Partai NasDem agak bertingkat dari DPW usulan Ketum, lalu caketum DPW atau dewan pimpinan tingkat provinsi, diteruskan kepada Majelis Tinggi, Majelis Tinggi akan melakukan rapat pemilihan Ketum. (Hidayat 2019).*

Menilik fenomena ketergantungan partai atas satu figur sehingga berimbas pada munculnya calon tunggal dalam setiap sirkulasi kepemimpinan berdampak negatif terhadap demokrasi internal partai. Hal ini dikarenakan partai minim persaingan dalam kontestasi kepemimpinan. Padahal demokrasi adalah memberikan kesempatan yang sama untuk dapat memilih dan dipilih. Selain itu seperti yang dikatakan oleh Norden bahwa persaingan moderat<sup>1</sup> adalah yang paling menjanjikan untuk demokrasi.

*“Moderate competition, according to Norden, is the most promising for democracy, as it prevents the rise of extra-system movements attendant to collusive competition (because significant interests may be unrepresented) and the chaos of combative competition (in which defeating one’s rival is more important than the survival of democracy itself). From the perspective of party system institutionalization, moderate competition would seem to offer advantages as it would presage orderly change” (Norden, 1998).*

Berdasarkan ketiga bentuk personalisasi partai politik di atas, merujuk pada Blondel, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya personalisasi partai yakni “*kharisma*” dari seorang tokoh partai sehingga menjadikannya sebagai individu yang sangat berpengaruh baik bagi partai maupun konstituennya. Kharisma menurut Weber, “*a certain quality of an individual personality by virtue of which he is considered extraordinary and treated as endowed with supernatural, superhuman, or exceptional forces or qualities*” (Blondel & Thiebaut, 2010). Figur Megawati yang merupakan putri dari presiden Soekarno memiliki nilai politik tersendiri yakni

<sup>1</sup> Norden melihat bahwa persaingan inter-partai merupakan kondisi yang penting bagi demokrasi. Ia membaginya menjadi tiga macam persaingan yakni *collusive*, *combative* atau *moderate*.

kharisma yang dimilikinya dalam melakukan perlawanan di era Orde Baru dan juga kharisma ayahnya. Keistimewaan ini yang kemudian menjadikan Megawati berpengaruh terhadap jalannya partai dan juga relasi dengan konstituen. Selain itu, sentralisasi keputusan partai yang berada di tangannya, semakin menguatkan *image* personalisasi Megawati terhadap PDI perjuangan.

Adapun figur Prabowo, sebagai purnawirawan militer juga memiliki kharisma tersendiri di mata kader partai dan konstituen sehingga dengan mengidentikkan figur dengan partai maka harapannya dapat mendulang suara dalam pemilu. Latar belakangnya sebagai seorang purnawirawan militer bahkan dapat menjadi perekat partai melalui komando yang menjadi instruksinya.

Adapun faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya personalisasi adalah kultur patronase (Budiatri & dkk, 2018). Kultur ini terbangun dari sebuah relasi patron-klien di mana relasi ini menjadikan seseorang yang memiliki sumberdaya yang kuat (terutama dalam hal materi) maka akan menjadi pemegang kuasa sementara yang lainnya hanyalah menjadi pengikut. Kondisi patronase ini yang juga dapat mempengaruhi terjadinya personalisasi di partai politik akibat ketergantungan terhadap satu individu tertentu.

Patronase yang terjadi dalam partai politik dapat dilihat melalui relasi patron-klien yang terjadi yakni sebagai hubungan diantara dua orang/pihak, yaitu individu/pihak yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi (patron) dan kerap menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk melindungi dan/atau memberikan keuntungan untuk individu/pihak (klien), yang dalam hal ini akan memberikan dukungan, bantuan dan pengabdian kepada patronnya (Budiatri, 2018). Terkait dengan faktor patronase ini, hubungan yang terjadi di dalam partai Nasdem dan juga Gerindra merupakan bentuk patronase. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya figur Surya Paloh dan Prabowo tidak dapat dilepaskan dari dukungan finansial yang dimilikinya (Budiatri, 2018). Surya Paloh dikenal sebagai pemilik salah satu media terbesar di Indonesia (Media Group). Sedangkan Prabowo juga dikenal sebagai pengusaha dan didukung oleh adiknya Hasim yang juga pengusaha.

Dalam perkembangannya, mengapa partai politik kemudian terjebak pada personalisasi,

salah satu kondisi yang menjadi pemicu adalah mahalannya mendirikan partai politik. Untuk mendirikan partai, setidaknya harus memenuhi beragam persyaratan yakni memiliki banyak pengurus yang tersebar di berbagai daerah, termasuk ranting dan cabang serta anggota partai. Untuk mengelola pengurus partai dan kader sebanyak itu memerlukan modal yang besar sehingga tidak semua orang mampu mendirikan partai di Indonesia. Berdasarkan pengalaman partai di Indonesia, tokoh-tokoh dibalik pendirian partai selain kalangan politisi dan profesional, terdapat konglomerat, pengusaha, maupun pensiunan TNI. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika pendanaan partai berpusat kepada pendiri partai atau bahkan ketua umum. Dalam hal ini, personalisasi partai dengan demikian dapat pula terjadi karena motif ekonomi untuk menghidupi partai. Ketika regenerasi kepemimpinan partai berhenti dan pendanaan partai hanya bersumber pada seorang tokoh atau partai berjejaring dengan para pemangku kepentingan hanya melalui satu aktor kunci tertentu, maka pengasosiasian partai dengan tokoh tersebut tidak dapat lagi dihindarkan. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mempertahankan roda aktivitas partai politik. Dampaknya, stagnasi kepemimpinan menjadi tak terhindarkan. Gejala ini yang kemudian terus terjadi dalam waktu yang lama, hingga melahirkan politik kekerabatan bahkan dinasti, bukan lagi menjadi partai berbasis kader.

Kehadiran tiga figur partai yang dominan tersebut dalam perjalanannya menjadi hal yang melingkupi terjadinya personalisasi seperti yang diungkapkan oleh Renwick dan Pilet. Figur tersebut sangat berpengaruh dalam persolan politik dan pemerintahan di mana mereka dapat menempatkan keluarganya dalam jabatan-jabatan politik di partai maupun pemerintahan. Selain itu, pengaruh figur sentral tersebut juga terlihat dalam proses pemilu terutama dalam kaitannya dengan proses kandidasi dan nominasi. Terkait dengan proses kandidasi, kekuatan figur utama kerap menjadi aktor penentu, seperti PDI perjuangan oleh Megawati dan Gerindra oleh Prabowo (Heriyanto, 2020).

### **Dampak Personalisasi Partai Politik terhadap Demokrasi Internal Partai**

Membahas partai politik tentu tidak terlepas dari pembahasan mengenai demokrasi

internal (*Intra-Party Democracy/IPD*). IPD mencerminkan pola relasi kuasa yang setara diantara aktor-aktor di dalam sebuah partai politik. IPD merupakan karakter distribusi atas kekuasaan dalam pembuatan keputusan antara anggota dan pemimpin di dalam sebuah partai politik yang didasarkan pada prinsip inklusivitas dan desentralisasi. Inklusivitas merujuk pada pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan dalam partai, sedangkan desentralisasi mencerminkan tingkatan pembuatan keputusan di dalam partai, apakah keputusan diambil oleh sedikit atau banyak orang. Upaya untuk melakukan demokrasi internal partai politik menjadi salah satu projek dari International IDEA di mana upaya tersebut dilakukan dengan memaksa partai untuk melakukan reformasi melalui identifikasi tantangan yang dihadapi sehingga partai menjadi lebih demokratis, transparan dan efektif. Demokrasi internal partai juga menjadi cara/jalan untuk menghadapi kemunduran dalam hal keanggotaan partai (*W. P. Cross & Katz, 2013; S. E. Scarrow, 2005*). Berkaca dari pengalaman munculnya personalisasi yang melanda partai-partai di Indonesia, maka sebenarnya kondisi tersebut berdampak buruk terhadap demokrasi internal partai.

Dampak buruk dari personalisasi yakni partai mengabaikan aturan. Dalam kaitannya dengan aturan semestinya partai politik membangun demokratisasi internal (*intra-party democracy*) dengan melibatkan seluas-luasnya peran serta anggota/kader supaya dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan deliberatif. Keharusan untuk mengikutsertakan seluruh anggota parpol dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan penting karena UU Parpol meletakkan kedaulatan parpol ada di tangan seluruh anggota. Sehingga anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. Jika dilihat dari AD ART partai maka hanya PDI Perjuangan yang mencantumkan bahwa aklamasi merupakan salah satu mekanisme yang diakui dalam suskesi ketua umum. Namun, yang menjadi persoalan dalam tubuh PDI Perjuangan menurut penulis adalah mengapa Megawati selalu menjadi calon tunggal dalam pemilihan ketua umum di partai banteng selama dua dekade. Partai Gerindra dan Nasdem tidak mengenal mekanisme aklamasi.

Namun, dalam prakteknya, baik Prabowo maupun Surya Paloh, keduanya terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi dan menjadi calon tunggal. Dengan tiadanya kader partai lain yang maju dalam suksesi kepemimpinan dan hanya mengandalkan calon tunggal dengan dalih kapabilitas yang dimiliki, kondisi ini tidak efektif dalam upaya demokratisasi internal partai. Selain partai terlalu bergantung pada figur sentral tersebut, personalisasi juga berdampak pada regenerasi partai ke depannya.

Dampak lainnya dari personalisasi yakni stagnasi regenerasi partai.. Kultur patron-klien masih menjadi faktor dominan dalam berkarier di partai apalagi dalam hal kontestasi kepemimpinan pusat.. Di tingkat pusat, regenerasi partai dalam hal posisi ketua umum mayoritas partai masih didominasi oleh elit lama, bahkan beberapa partai gagal melakukan regenerasi dan resirkulasi. Menurut Arya Fernandes, peneliti CSIS, "*di internal partai politik, belum terjadi jenjang karier yang jelas, hal ini menyusahkan anak muda untuk berkarier di politik*" (Maharddika, 2016). Selain itu, personalisasi berpotensi menyuburkan terjadinya dinasti politik. Kondisi ini bisa dilihat bagaimana para figur sentral PDI Perjuangan, Gerindra maupun Nasdem menempatkan keluarganya dalam struktur partai maupun jabatan-jabatan politik penting lainnya.

Personalisasi partai jika dipertahankan dalam jangka lama juga berpotensi memicu terjadinya faksionalisasi dan konflik. Faksi merupakan kelompok intrapartai, yang anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan faksi bisa beragam antara lain; mempertahankan patronase dan kontrol partai, mempengaruhi kebijakan partai dan mengusulkan serangkaian nilai baru dalam partai. Meskipun PDI Perjuangan, Gerindra dan Nasdem belum menunjukkan gejala faksionalisasi yang terbaca di publik namun menurut penulis, partai juga semestinya mulai melakukan upaya sirkulasi kepemimpinan yang kompetitif dan demokratis, tidak lagi bergantung pada satu figur tertentu yang pada akhirnya memunculkan calon tunggal dalam setiap suksesinya.

Faksionalisasi merupakan suatu proses yang dinamis atas sebuah kelompok yang dalam prakteknya faksionalisasi disatuisasi dapat mempersatukan partai namun pada kebanyakan

praktek di Indonesia dapat menimbulkan konflik dan terjadinya fragmentasi partai (Budiatri & dkk, 2018). Konflik merupakan kondisi yang sulit dihindarkan dari politik apalagi organisasi parpol yang memiliki kepentingan merebut kekuasaan politik. Bentuk konflik sendiri dapat bersifat sementara misalnya saat proses suskesi kepemimpinan dan kepengurusan partai, atau juga bisa dalam jangka waktu yang lebih lama akibat ketidakdisiplinan dan lemahnya loyalitas faksi-faksi terhadap partai atau pemimpin partai (Hine, 1982). Akibatnya, ketika kepentingan faksi-faksi tidak terakomodasi oleh pimpinan partai maka fragmentasi pun terjadi dan tidak sedikit tokoh-tokoh partai tersebut yang kemudian keluar dari partai dan mendirikan partai baru. Konflik internal yang berujung pada fragmentasi berbahaya bagi soliditas partai. Padahal, soliditas partai merupakan salah satu prasyarat terlembaganya sebuah partai politik. Partai politik era reformasi semestinya menjadi kekuatan politik di Indonesia yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, alih-alih menjadi partai yang demokratis namun justru terjebak pada personalisasi. Padahal, sebagai salah satu pilar demokrasi, kehadiran partai politik menjadi instrument penting dalam upaya melakukan konsolidasi demokrasi ke depan. Jika partai politik tidak mampu menjalankan demokrasi internal salah satunya dengan membenahi suksesi kepemimpinan, lalu bagaimana nasib pelebagaan partai ke depannya. Kondisi inilah yang menjadi pekerjaan rumah bersama baik antara partai politik, pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pembenahan demokrasi.

Sementara itu, berkaitan dengan dampak positif dari personalisasi partai politik seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa studi sebelumnya, analisa penulis menunjukkan bahwa dampak ini hanya bersifat semu dan sementara. Kuskrido Ambardi (2020) dalam diskusi daring dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI pada 14 Juli 2020 mengetengahkan bahwa, dalam beberapa kasus, faktor ketokohan yang kuat atau personalisasi politik dalam partai memang benar menjadi faktor yang mendukung eksistensi partai itu sendiri, misalnya PDI Perjuangan dengan figur Megawati. Sekalipun PDI Perjuangan kini juga dapat disebut sebagai *Presidensialized Party* dengan sosok Joko Widodo sebagai *outsider* yang mampu menarik

perhatian konstituen karena statusnya sebagai presiden dari PDI Perjuangan, personalisasi dari sosok Megawati tetap tidak bisa lepas dari citra partai ini. Padahal menurut hemat penulis, mengingat bahwa partai tersebut termasuk dalam kategori partai senior di Indonesia, seharusnya PDI Perjuangan sudah mampu bertahan tanpa bayang-bayang sosok kharismatik Megawati. Ketika ketokohan yang kuat atas Megawati tetap dibiarkan dan suatu ketika tampuk kepemimpinan di partai ini berganti ke tangan orang lain, maka dua kemungkinan dapat terjadi. *Pertama*, sosok ketua partai yang baru hanya akan menjadi pemimpin bayangan partai, atau, *kedua*, eksistensi dan capaian partai justru akan menurun karena kehilangan sosok kunci, yaitu Megawati. Dampak yang demikian dapat secara nyata dilihat dari pengalaman Partai Demokrat. Ketika sosok SBY yang pada sebelumnya secara langsung memegang kendali dalam struktur legal partai harus digantikan, eksistensi dan capaian Partai Demokrat yang dapat dilihat dari hasil pemilu 2014 menjadi terjun bebas bahkan kehilangan cengkraman basis suara di beberapa daerah.

## SIMPULAN

Partai politik menjadi ujung tombak perbaikan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, melalui partai politik-lah akan dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa. Namun, setelah dua dekade reformasi, upaya demokratisasi di dalam tubuh partai politik nampaknya masih jalan di tempat. Partai politik saat ini nampak enggan untuk berbenah, salah satunya dapat dilihat pada persoalan personalisasi partai. Kondisi ini terlihat di mana partai masih didominasi oleh satu figur/individu sehingga muncul anggapan bahwa tidak ada figur lain yang mempuni untuk menjadi pemimpin partai. Problem ini memperlihatkan bahwa partai politik dibangun dari sistem ketergantungan pada figur-figur tertentu. Ketergantungan tersebut juga dipengaruhi oleh motif ekonomi di mana terjadi ketergantungan partai pada pendanaan ketua umum maupun jejaringnya. Lebih dari itu, dominasi individu dalam sebuah partai politik telah mencederai demokrasi internal partai yang pada akhirnya membuat partai politik tersebut tidak terlembagakan dengan baik. Padahal, salah satu dimensi penting untuk melihat

apakah sebuah partai telah terlembagakan dengan baik atau tidak adalah dengan melihat apakah terdapat dominasi personal dari individu tertentu dalam partai politik tersebut dan juga tingkat soliditas partai. Nampaknya, dengan melihat fenomena personalisasi partai yang masih menggejala, maka yang menjadi tantangan demokrasi Indonesia ke depan salah satunya adalah memastikan terjadinya perubahan dalam demokrasi di internal partai. Oleh karena itu, berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari personalisasi partai politik hanya dapat bekerja optimal pada awal pendirian partai karena partai baru masih memerlukan figur tertentu sebagai lokomotif yang menggerakkan seluruh gerbong partainya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, partai dituntut untuk dapat melembagaan partainya menjadi partai modern yang memiliki struktur dan mekanisme organisasi yang legal dan rasional agar tidak berdampak pada buruknya demokrasi internal partai dan eksistensinya dalam kontestasi elektoral.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2019). Desrio: Gerindra Partai Komando, Tak Ada Hambatan Jika DPP Ingin Ganti Pengurus. Diakses pada September 29, 2020, dari <https://www.covesia.com/news/baca/88003/desrio-gerindra-partai-komando-tak-ada-hambatan-jika-dpp-ingin-ganti-pengurus>
- Aini, N. (2017). Parpol tingkat pusat pilih kandidat kepala daerah dikritisi. Diakses 9 April 2020, dari <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/03/06/nasional/politik/17/10/15/oxuemj382-parpol-tingkat-pusat-pilih-kandidat-kepala-daerah-dikritisi>.
- Alhamid, A., & Perdana, A. (2018). Presidentialized Party di Indonesia: Kasus Perilaku PDI-P dalam Pencalonan Joko Widodo pada Pilpres 2014. *Jurnal Politik*, 3(2), 237. <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.125>
- Blondel, J., & Thiebaut, J.-L. (2010). *Political Leadership, Parties and Citizens: The Personalisation of Leadership*. New York: Routledge.
- Budiatri, A. P. (2018). Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*, 15(726), 1–52.
- Budiatri, A. P., & dkk. (2018). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Calise, M. (2015). The personal party: An analytical framework. *Rivista Italiana Di Scienza Politica*, 45(3), 301–315. <https://doi.org/10.1017/ipo.2015.18>
- Cross, W. P., & Katz, R. S. (2013). *The Challenges of Intra-Party Democracy*. United Kingdom: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Dalton, R. J. (1985). *Political Parties and Political Representation: Party Supporters and Party Elites in Nine Nations*. *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/0010414085018003001>
- Dalton, R. J., Farrell, D. M., & McAllister, I. (2015). *Political Parties and Democratic Linkage*. *Political Parties and Democratic Linkage*. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199599356.001.0001>
- Diskusi daring Pusat Penelitian Politik LIPI dengan Kuskrindo Ambardi pada 14 Juli 2020
- Ferdiansyah, A. (2019). Pemilihan Ketum Nasdem Dipastikan Sesuai AD/ART.
- Gerindra. (n.d.). *Sejarah Partai Gerindra*. Diakses 9 April 2020, dari <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>.
- Heriyanto, G. Gun. (2020). *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hidayat, F. (2019). 34 DPW Usul Surya Paloh Jadi Calon Tunggal Ketum NasDem.
- Hine, D. (1982). Factionalism in West European Parties: A Framework for Analysis. *West European Politics*, 5(1), 36–53. <https://doi.org/10.1080/01402388208424345>
- Ilahi, K. (2013). Profil Partai Nasdem. Diakses 7 April 2020, dari <https://nasional.sindonews.com/read/708291/12/profil-partai-nasdem-1358412429>.

- Karvonen, L. (2010). *The Personalization of Politics: a Study of Parliamentary Democracies*. United Kingdom: ECPR Press.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. In *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (pp. 38–54). <https://doi.org/10.2307/20047958>
- Lipset, S. M. (2000). The indispensability of political parties. *Journal of Democracy*. <https://doi.org/10.1353/jod.2000.0016>
- Litbang Kompas. (1999). *Partai-partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Maharani, T. (2020). Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal. Retrieved April 4, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/14300361/gerindra-siapkan-kongres-untuk-pemilihan-ketum-sekjen-sebut-prabowo-calon>.
- Mair, P. (2002). *Party System Change, Approaches and Interpretations*. New York: Oxford University Press.
- Mancini, P., & Swanson, D. L. (1996). Politics, Media, and Modern Democracy: Introduction dalam D. L. Swanson & P. Mancini (Eds.), *Politics, media and modern society* (pp. 1–26). Westport, CT: Praeger.
- Noor, F. (2009). Menimbang Masa Depan Sistem Presidensial di Indonesia Problematika Demokrasi dan Kebutuhan Perbaikan Sistemik dalam M. Nurhasim & I. N. Bhakti (Eds.), *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norden, D. (1998). "Party Relations and Democracy in Latin America", dalam Tan, P.J. (2006). *Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy*. *Contemporary Southeast Asia* 28 (1), 88–114. DOI: 10.1355/cs28-1e
- Nurdiansyah, F. (2018). Marketing Politik Dpp Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), 60. <https://doi.org/10.14710/politika.9.1.2018.60-70>
- Nurhasim, M. (2013). Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17–28.
- Pilet, J.-B., & Cross, W. (2015). Uncovering The Politics of Party Leadership dalam W. Cross & J.-B. Pilet (Eds.), *The Politics of Party Leadership: A Cross National Perspective* (pp. 1–15). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Rahat, G., & Kenig, O. (2018). *From Party Politics to Personalized Politics?: Party Change and Political Personalization in Democracies*. Oxford, UK: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahat, G., & Sheaffer, T. (2007). The personalization(s) of politics: Israel, 1949-2003. *Political Communication*, 24(1), 65–80. <https://doi.org/10.1080/10584600601128739>
- Redaksi CNN Indonesia. (2019). Megawati Kembali Terpilih Jadi Ketum PDIP secara Aklamasi. Diakses pada September 29, 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190808202054-32-419683/megawati-kembali-terpilih-jadi-ketum-pdip-secara-aklamasi>
- Redaksi Jemberita. (2019). SAH Tegaskan Gerindra Partai Komando, Tak Ada Ruang Untuk Perpecahan. Diakses pada September 29, 2020, dari <https://jamberita.com/read/2019/03/19/5948370/sah-tegaskan-gerindra-partai-komando-tidak-ada-ruang-untuk-perpecahan/>
- Renwick, A., & Pilet, J.-B. (2016). *Faces on the Ballot: The Personalization of Electoral Systems in Europe*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Rhodes, E. R. A. W., & Hart, P. (2014). *The Oxford Handbook of Political Leadership*. The Oxford Handbook of Political Leadership. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199653881.001.0001>

- Samuels, D. J. (2002). Presidentialized parties: The separation of powers and party organization and behavior. *Comparative Political Studies*, 35(4), 461–483. <https://doi.org/10.1177/0010414002035004004>
- Samuels, D., & Shugart, M. S. (2010). *Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior*. New York: Cambridge University Press.
- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*. UK: ECPR Press.
- Sartori, G., & European Consortium for Political Research. (2005). *Parties and party systems : a framework for analysis*. ECPR. Retrieved from [https://books.google.co.id/books/about/Parties\\_and\\_Party\\_Systems.html?id=ywr0CcGDNHwC&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Parties_and_Party_Systems.html?id=ywr0CcGDNHwC&redir_esc=y)
- Scarrow, S. (2005). *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives*. National Democratic Institute for International Affairs. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001002>
- Scarrow, S. E. (2005). Implementing intra-party democracy. *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives*, 22. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001002>
- Stokes, S. C. (1999). *Political Parties and Democracy*. *Annual Review of Political Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.243>
- Utama, A. (2019). PDIP: Megawati secara resmi akan memimpin lagi partai banteng, namun sampai kapan? Diakses 5 April 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49273929>.
- Yeremia. (2020). KLB Tetapkan Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra 2020-2025, diakses pada 7 September 2020, dari <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/politik/663425/klb-tetapkan-prabowo-subianto-ketua-umum-gerindra-20202025>.
- Yudha, H. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati: dari dilema ke kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zhacky, M. (2020). Ini Alasan Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus. Diakses pada September 29, 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-5123158/ini-alasan-gerindra-gelar-kongres-luar-biasa-8-agustus>